



**Judul** : Pemerintah Tetap Akan Sahkan RUU Ormas  
**Tanggal** : Selasa, 25 Juni 2013  
**Surat Kabar** : Suara Karya  
**Halaman** : 3

## Pemerintah Tetap Akan Sahkan RUU Ormas

JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah tetap akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), setelah DPR menyetujui draf tersebut dalam rapat paripurna, Selasa (25/6).

"Kami sepakat, Pemerintah akan jalan terus. Saya memahami secara keseluruhan apa yang disampaikan fraksi-fraksi," kata kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi di Jakarta, Senin (24/6). Terkait penolakan dari sejumlah ormas, Mendagri mengaku pihaknya telah menampung dan membahas usulan dari sejumlah ormas tersebut.

Segala usul dan penda-

pat yang masuk selama pembahasan RUU Ormas telah diakomodasi oleh tim dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan panitia khusus (pansus) dari DPR. "Semua sudah diperbincangkan, bahkan dulu sempat ditunda (pengesahannya) karena masih diperlukan dialog," katanya.

Pihak-pihak yang merasa keberatan dengan UU Ormas tersebut nantinya dapat mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Itu lebih baik, untuk menguji apakah benar atau salah UU itu, tapi disahkan terlebih dahulu. Itu saluran konstitusional yang harus kami hormati," katanya.

Pemerintah menilai

pengaturan ormas di Tanah Air diperlukan untuk memperkuat fungsinya sebagai kekuatan bangsa. "UU ini bukan mengatur soal salah atau benar saja, tetapi seperti apa peran ormas sesungguhnya. Ada 90 ribu lebih ormas, maka itu perlu diatur," ucapnya.

Sebelumnya, PP Muhammadiyah dan Konferensi Wajilgereja Indonesia (KWI), menolak keras pengesahan RUU Ormas karena dinilai masih terdapat pasal yang multitafsir. "Ada kepentingan tersembunyi di balik rumusan Undang-undang Ormas, yang sengaja memperlemah posisi ormas sebagai pilar demokrasi," ujar Sekretaris Eksekutif Hubungan Agama

dan Kepercayaan KWI Benny Susetyo.

Menurut Romo Benny, pihaknya hanya sekali diundang untuk berdialog mengenai rumusan UU tersebut, namun masukan dari KWI tidak diakomodasi sebagaimana mestinya. "Masukan dari KWI hanya ditampung, tetapi realitasnya tidak mengubah isi," tuturnya.

RUU Ormas akan dibawa ke rapat paripurna DPR, Selasa (25/6), untuk disetujui sebelum disahkan menjadi UU oleh Presiden. Dari sembilan fraksi yang ada di DPR, hanya satu yang belum menyetujui RUU tersebut dibawa ke rapat paripurna, yaitu Partai Amanat Nasional (PAN). (Rully/Ant/Tri Handayani)